

## DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: SPI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Dewi Ika Sari  
*dewiikaaa30@gmail.com*  
Maswar Patuh Priyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to examine the effect of human resource competence and utilization of information technology on quality of local government financial statement with internal control system as moderating variable (Study of Regional Government organization of Sidoarjo). The research was quantitative. While, the data were primary with questionnaire as the instrument. Moreover, the population was 20 Regional Government Organization of Sidoarjo. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 68 employees of Regional Government Organization as sample. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression and moderated regression analysis with SPSS 23. The research result concluded human resource competence and utilization of information technology had positive and significant effect on quality of local government financial statement. In contrast, internal control system could not moderate human resource competence on quality of local government financial statement. However, internal control system could moderate utilization of information technology on quality of local government financial statement.*

*Keywords: KSDM, PTI, SPI, KLKPD.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: sistem pengendalian intern sebagai variabel pemoderasi (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang pemilihan sampel berdasarkan kriteria. Jumlah sampel sebanyak 68 pegawai dari 20 OPD Kabupaten Sidoarjo. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* dengan *software* SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya sistem pengendalian intern tidak dapat memoderasi positif kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern dapat memoderasi positif pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: KSDM, PTI, SPI, KLKPD.

### PENDAHULUAN

Dengan dicanangkannya program reformasi birokrasi pengelolaan keuangan negara di suatu entitas pemerintah mengalami perkembangan yang signifikan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Perkembangan tersebut terkait dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP). Penyusunan laporan keuangan diperlukan untuk memberikan suatu informasi yang relevan mengenai posisi keuangan yang ada pada suatu entitas dalam periode akuntansi, sehingga laporan keuangan menjadi sangat berguna untuk membantu *top management* dalam proses pengambilan keputusan. Pada sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya kepada *stakeholder* maupun masyarakat. Disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi keempat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh sdm yang berkompeten dan menguasai teknologi infomasi. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi pemerintah membutuhkan suatu sistem pengendalian inten yang memadai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian internal menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan. Ketika Badan Pengawas Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Dalam laporan keuangan pemerintahan faktanya, masih banyak disajikan atau dilaporkan dengan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2019 yaitu opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir telah mengalami peningkatan, yang awalnya 47% pada tahun 2014 menjadi 82% pada tahun 2018. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas 542 LKPD Tahun 2018 telah mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 443 (82%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 86 (16%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*) atas 13 (2%) LKPD. Dalam 5 tahun terakhir (2014-2018) yang telah dijelaskan di IHPS 1 Tahun 2019 LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan yaitu 47% pada LKPD tahun 2014, sekarang menjadi 82% pada LKPD Tahun 2018. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meneliti keawajaran laporan keuangan pemerintah menggunakan sistem pengendalian intern sebagai salah satu kriterianya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas 18 Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah (LKPHLN) Tahun 2018 mengungkapkan 39 permasalahan yang terdiri atas 39 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 16 permasalahan kelemahan sistem pengendalian, pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, serta 15 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian internal dan pelaporan, yaitu; pencatatan belum dilakukan secara baik, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum memadai, dan kurangnya dukungan sumber daya manusia yang kompeten.

Fenomena mengenai kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan obyek Kabupaten Sidoarjo, dengan predikat yang diperoleh yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut. WTP yang diraih Sidoarjo salah satunya karena Kabupaten Sidoarjo dinilai telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang bagus. Dari tahun ke tahun tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan sistem pengendalian intern sebagai variabel pemoderasi. Dengan permasalahan yang semakin kompleks dan adanya tuntunan untuk menyajikan laporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, maka akan menjadi tantangan tersendiri dalam suatu entitas untuk mempertahankan opini WTP dari BPK. Selain itu pemilihan subjek dalam penelitian ini didukung dengan fenomena pemberitaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh salah satu kepala daerah di Provinsi Jawa Timur ini yaitu di daerah Kabupaten Sidoarjo. Pernyataan yang dilakukan oleh Ramadhan (2020), melaporkan bahwa Bupati Sidoarjo tersandung dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo beserta enam orang lainnya. Munculnya pemberitaan ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui perihal kualitas laporan keuangan pemerintah di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?. (2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?. (3) Apakah sistem pengendalian intern dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?. (4) Apakah sistem pengendalian intern dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Untuk menguji pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Untuk menguji sistem pengendalian intern dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (4) Untuk menguji sistem pengendalian intern dalam memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Keagenan (*Teory Agency*)

Teori keagenan merupakan suatu konsep yang mendasari adanya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan pada organisasi sektor publik. Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*". Pemerintah sebagai pihak pemegang amanah (*agent*) berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat selaku (*principal*). Transparansi melalui laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban yang dihasilkan oleh *agent*.

Teori ini didasarkan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* yang terjadi karena adanya asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Konflik kepentingan akan muncul dari pendelegasian tugas yang diberikan kepada *agent* dikarenakan pihak pemegang amanah kurang memaksimalkan kesejahteraan *principal* tetapi memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri.

### Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)

Kompetensi dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan dasar dan kualitas kerja yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang ditunjukkan melalui pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menjalankan tugasnya secara profesional dalam suatu bidang tertentu (Fikri *et al.*, 2015). Dalam hal ini, kompetensi sumber daya

manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas demi keberhasilan organisasi untuk mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi sehingga dapat meminimalisir kesalahan pencatatan atau risiko kekeliruan.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)**

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam organisasi swasta tetapi juga dalam organisasi sektor publik, termasuk dalam pemerintah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan, dijelaskan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Menurut Nurillah (2014), pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengelola sebuah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, agar informasi yang dihasilkan menjadi berkualitas, serta informasi yang dihasilkan menjadi relevan, akurat dan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan yang merupakan informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan.

### **Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

Sistem pengendalian intern adalah alat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian manajemen akan tercapai. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari sistem pengendalian intern diterapkan yaitu agar laporan keuangan andal, efisiensi dan efektifitas terhadap kegiatan operasi pemerintah serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatannya, pemerintah daerah harus memiliki sistem pengendalian intern yang baik. Dengan banyaknya kasus penyelewengan seperti kasus korupsi, penyalahgunaan keuangan negara, pemborosan anggaran, dan kualitas laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan standart yang ada merupakan salah satu dampak adanya pelaksanaan sistem pengendalian intern yang lemah (Widari dan Sutrisno, 2017).

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD)**

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan dalam periode tertentu. Laporan keuangan pada pemerintah daerah merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain (*stakeholder*) mengenai kondisi keuangan pemerintah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, reliasasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang dihasilkan nantinya dapat bermanfaat dalam pemberian suatu informasi bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan dan evaluasi kinerja. Dalam pembuatan laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang dikehendaki sesuai dengan (PP No. 71 tahun 2010) yaitu sebagai berikut:

### 1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang tercantum didalamnya sesuai dengan tujuan operasional perusahaan dan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan yang dimaksud adalah sebagai berikut

- a. Memiliki manfaat umpan balik, informasi hendaknya memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif, dapat membantu pengguna dalam memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu.
- c. Tepat waktu, informasi disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, pengungkapan dalam informasi disajikan secara jelas sehingga mampu mencegah terjadinya kekeliruan dalam penggunaan informasi.

### 2. Andal

Informasi pada laporan keuangan bebas dari informasi yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta yang jujur, dan dapat diverifikasi.

### 3. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya serta dapat dibandingkan laporan keuangan entitas pelaporan lainnya.

### 4. Dapat Dipahami

Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna serta dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai penggerak suatu organisasi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang profesional untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan yang baik. Menurut Oktavia dan Rahayu (2018) menyatakan bahwa dalam keberhasilan pembuatan laporan keuangan yang berkualitas, maka diperlukan SDM yang berkompeten serta latar belakang pendidikan yang baik dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Sumber daya manusia yang berkompeten akan bekerja dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga dapat bekerja dengan efektif, efisien sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan. Penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016), Hanalir *et al.* (2018) dan Ramadhani *et al.* (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemanfaatan teknologi sangat membantu organisasi sektor publik khususnya para pegawai dibidang akuntansi/keuangan dalam mengakses, mengelola, mendayagunakan dan menyalurkan informasi keuangan pemerintah daerah secara cepat dan akurat. Menurut Kurniawati *et al.* (2018) menyatakan bahwa dengan adanya teknologi informasi dapat membantu tugas-tugas pegawai instansi pemerintahan dalam menyusun suatu laporan keuangan pemerintah serta memudahkan pegawai dalam memproses, mengolah dan menyimpan keuangan secara terstruktur, sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Karena

seluruh aktivitas dalam pengelolaan keuangan akan tercatat secara otomatis dan laporan keuangan yang dihasilkan akan baik karena laporan yang dibuat dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

### **Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau penyelenggara pemerintahan untuk mengelola keuangan dengan baik, dengan memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari ketepatan laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem pengendalian intern yang baik juga didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten sehingga diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Risiko dalam pemrosesan data adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi karena perilaku manusianya sendiri, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Dalam hal ini, OPD di Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan SPI yang baik. Dengan adanya SPI yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga bisa digunakan sebagai masukan bagi pengguna laporan keuangan pada waktu yang akan datang (Fikri *et al.*, 2015). Penelitian menggunakan sistem pengendalian intern sebagai variabel pemoderasi atas kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi belum banyak dilakukan, sehingga peneliti mencoba menguji hal tersebut berdasarkan asumsi yang sudah dijelaskan diatas. Kesalahan yang disengaja dapat berbentuk kecurangan atau penyelewengan kekayaan perusahaan dalam memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh seseorang maka perlu ada nya sistem pengendalian intern. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

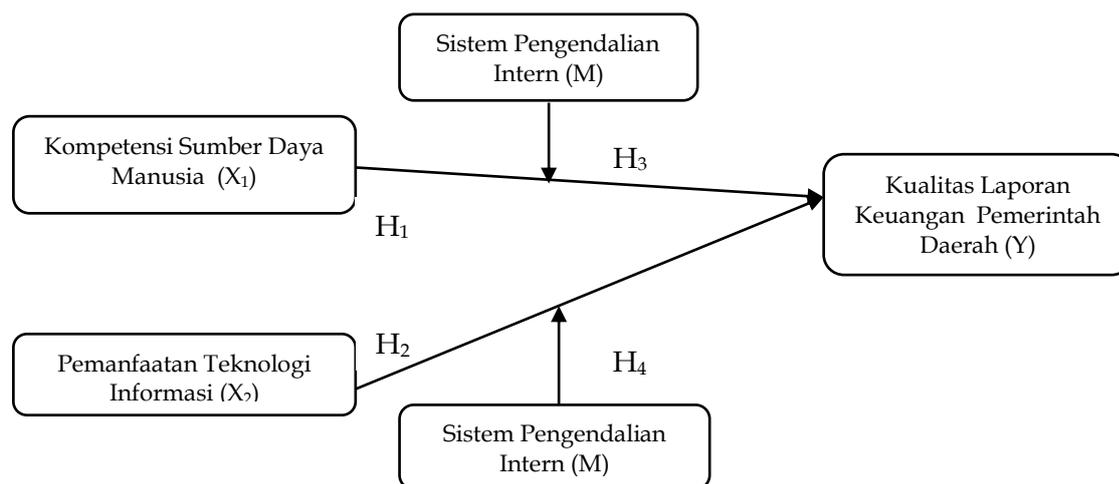
Dalam menyajikan laporan keuangan yang andal, efektif dan efisien maka suatu instansi pemerintah harus menggunakan sistem akuntansi didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang baik. Pengendalian intern tidak pernah bisa menghilangkan risiko, tetapi dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pencapaian tujuan dari sebuah organisasi.

Sistem pengendalian intern adalah merupakan suatu proses berkelanjutan di dalam organisasi (entitas) yang dipengaruhi oleh dewan pengawas (*board*), manajemen, dan personel lainnya. Sistem pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolut, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas pengendalian, membuat proses ini menjadi tidak sempurna. Dalam hal ini, OPD di Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan sistem aplikasi keuangan yang terintegrasi dan saling terkontrol dengan didukung dengan penerapan SPI yang baik, sehingga menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dapat memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>4</sub>: Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1  
Model Penelitian

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori apakah penelitian tersebut mendukung atau menolak teori yang digunakan dengan melakukan analisis data menggunakan uji statistik dan dihitung dengan bantuan program SPSS 23. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi, yaitu variabel yang dapat memperkuat dan memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2013). Populasi dari penelitian ini adalah OPD Kabupaten Sidoarjo.

#### Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki sebuah populasi (Sugiyono, 2013). Teknik pengambilan sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan data-data yang telah dipertimbangkan dan memiliki kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena terhalang oleh ijin dari masing-masing kepala dinas. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 68 pegawai dari 20 OPD Kabupaten Sidoarjo. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Dinas yang mengizinkan metode pengumpulan data berupa kuesioner; (2) Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada OPD Kabupaten Sidoarjo; (3) Responden dalam penelitian adalah kepala dinas, kasubbag dan staff akuntansi/tata usaha keuangan.

#### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yakni data primer. Data primer atau sumber data adalah data yang diberikan langsung oleh pemberi data atau responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini data primer dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner adalah pengumpulan data dengan menyebarkan angket berupa suatu daftar pertanyaan tertulis kepada responden terpilih yang telah disediakan.

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dengan menemui responden OPD di Kabupaten Sidoarjo.

## **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

### **Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu dalam bentuk apa saja, yang di tetapkan oleh peneliti untuk dikaji lebih dalam sehingga menghasilkan informasi yang hasilnya dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel pemoderasi.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_1$ )**

Menurut PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya agar dapat mencapai tujuan organisasi. Variabel ini menggunakan 3 indikator yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_2$ )**

Menurut PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dapat megoptimalkan proses kerja karena dilakukan secara terpadu dan menyederhanakan akses antar unit. Sehingga mempengaruhi kepuasan para pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan, dan keakuratan data yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Variabel ini menggunakan 3 indikator yaitu jaringan komputer dan internet yang memadai, proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi, penggunaan *software* sesuai dengan undang-undang.

### **Sistem Pengendalian Intern (M)**

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan. Variabel ini menggunakan 5 indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Variabel ini menggunakan 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

### **Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data yaitu merupakan metode atau cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga data dapat dengan mudah di mahami, pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan regresi linier berganda karena melibatkan lebih dari satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas dengan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 23, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi dan analisis deskriptif.

### Analisis Statistik deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data yaitu dengan cara memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul dan dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*. Akan tetapi tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum.

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dikatakan valid apabila suatu kuesioner terdapat yang mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan untuk membandingkan nilai r hitung dengan rtabel dengan *degree of freedom* ( $df$ ) = jumlah konstruk (n)-2. Jika r hitung > rtabel dan nilai r bernilai positif, maka dapat disimpulkan indikator atau pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid (Ghozali, 2018).

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang telah dibuat, kuesioner merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk (n). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal yaitu jika jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu dan stabil terhadap pertanyaan (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk (n) atau variabel dikatakan variabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) > 0,70 (Ghozali, 2018).

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dikatakan sebagai kriteria ekonometrika untuk melihat apakah hasil estimasi memenuhi dasar linier klasik atau tidak, dan pengujian ini dilakukan untuk memperoleh persamaan yang baik dan mampu memberikan estimasi yang handal. Pengujian ini dilakukan untuk pengujian terhadap empat asumsi klasik, yaitu: normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan *software* SPSS 23.

Pertama, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat variabel yang dapat mempengaruhi atau residual memiliki distribusi normal. Regresi akan dikatakan baik jika model regresi menghasilkan distribusi normal. Untuk menguji apakah residual berdistribusi bersifat normal atau tidak dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2018:161). Pada dasarnya uji normalitas dapat diketahui dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal grafik, yaitu: (1) Analisis grafik, dilihat dengan *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual yang dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi menghasilkan data normal, maka garis yang menggambarkan data sebenarnya akan mengikuti garis diagonalnya; (2) Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual yaitu uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menggunakan kriteria: (a) Bila nilai signifikan > 0,05 maka berdistribusi normal (2) Bila nilai signifikan < 0,05 maka berdistribusi tidak normal.

Kedua, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat korelasi, maka dinamakan terdapat *problem* multikolinearitas. Menurut Ghozali (2018:108) Untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Di dalam kedua ukuran ini dapat menunjukkan tiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* ini mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dasar pengambilan keputusan dari kedua ukuran ini sebagai berikut: (1) Jika nilai *Tolerance* dibawah 0,1 dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas yang artinya model regresi tidak baik; (2) Jika nilai *Tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas yang artinya model regresi baik.

Ketiga, uji heteroskedastisitas biasanya digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidakteraturan *variance* dari residual satu pengamatan ke dalam pengamatan yang lain, maka akan disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Model regresi yang baik yaitu yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk melihat heteroskedastisitas dengan melihat pola grafik *scatterplot*. Dengan menggunakan analisis sebagai berikut (Ghozali, 2018:138); (1) Jika memiliki pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur seperti: bergelombang, melebar, dan menyempit. Maka pola tersebut mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; (2) Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2018:95) Analisis linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh hubungan variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua variabel mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat menjelaskan ketergantungan variabel dependen satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2018). Metode regresi linier berganda digunakan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### Model 1

Analisis regresi berganda model 1 digunakan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berikut ini bentuk persamaan yang digunakan:

$$KLKPD = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 PTI + e$$

Keterangan:

KLKD : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstansta

$\beta_1$  : Koefisien Regresi dari KSDM

$\beta_2$  : Koefisien Regresi dari PTI

KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia

PTI : Pemanfaatan Teknologi Informasi

e : *error*

#### Model 2

Analisis regresi berganda model 2 menggunakan analisis regresi moderasi. Model pengujian regresi dengan variabel moderasi ada tiga yaitu uji interaksi *Moderated Regression Analysis* (MRA), uji nilai selisih mutlak dan uji residual. Pengujian penelitian ini menggunakan uji interaksi *Moderated Regression Analysis* (MRA) dimana hipotesis moderasi diterima apabila variabel ( $KSDM * SPI$ ) dan ( $PTI * SPI$ ). Berikut ini bentuk persamaan yang digunakan yaitu:

$$KLKPD = \alpha_1 + \beta_1 KSDM + \beta_2 SPI + \beta_3 KSDM * SPI + \beta_4 PTI * SPI + e$$

Keterangan:

KLKD : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstansta

$\beta_1$  : Koefisien Regresi dari KSDM

$\beta_2$  : Koefisien Regresi dari SPI

$\beta_3$  : Koefisien Regresi dari interaksi KSDM dan SPI

$\beta_4$  : Koefisien Regresi dari interaksi PTI dan SPI

KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia

SPI : Sistem Pengendalian Intern

- KSDM\*SPI : Variabel perkalian antara kompetensi SDM dan SPI yang menggambarkan pengaruh variabel pemoderasi SPI terhadap hubungan antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- PTI\*SPI : Variabel perkalian antara PTI dan SPI yang menggambarkan pengaruh variabel pemoderasi SPI terhadap hubungan antara PTI dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- e : *error*

### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis digunakan dalam menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018:99) untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen maka digunakan kriteria pengujian dengan tingkat yang signifikan  $\alpha = 5\%$  yaitu: (1) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_1$  akan ditolak; (2) Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  akan diterima.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan seluruh variasi variabel independen terhadap variabel dependen dapat dengan menggunakan uji koefisien. Besarnya koefisien determinasi dapat dilihat berdasarkan banyaknya *R-Squared* ( $R^2$ ) pada koefisien regresinya. Dimana koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu angka yang memberikan presentasi dari jumlah keseluruhan variasi pada variabel dependen (Y) yang di paparkan oleh variabel independen (X). Menurut Ghozali (2018:97) nilai R mempunyai besaran antara 0 sampai dengan satu atau ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Jadi semakin besar nilai yang mendekati satu maka perhitungan sudah dianggap kuat dalam mendeskripsikan variabel independen. Sebaliknya, semakin kecil nilai yang mendekati nol maka variasi variabel independen terbatas.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut Ghozali (2018:98) Uji kelayakan model dilakukan untuk menguji ketepatan model *goodness of fit* apakah model persamaan yang terbentuk masuk dalam kriteria cocok atau tidak. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Berikut pengambilan keputusan pada uji F, yaitu sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka berdistribusi normal; (2) Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka berdistribusi tidak normal.

## ANALISIS DAN PEMBAHASA

### Analisi Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif penelitian merupakan gambaran kondisi variabel dari Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) sebagai variabel independen, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) sebagai dependen, serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai variabel pemoderasi. Hasil pengolahan data statistik deskriptif dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KLKPD	68	24	40	33,30	4,118
KSDM	68	15	30	22,54	3,187
PTI	68	21	35	30,40	3,401
SPI	68	35	55	45,56	4,768
Valid N (listwise)	68				

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berasarkan Tabel 1 bahwa (1) Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) mempunyai nilai *mean* 33,30 dengan *standard deviation* sebesar 4,118. Hal ini menunjukkan bahwa *standard deviation* lebih kecil daripada nilai rata-rata. Sehingga mengindikasikan bahwa data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Serta mendapatkan nilai minimum sebesar 24 dan nilai maksimum sebesar 40; (2) Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) mempunyai nilai *mean* 22,54 dengan *standard deviation* sebesar 3,187. Hal ini menunjukkan bahwa *standard deviation* lebih kecil daripada nilai rata-rata. Sehingga mengindikasikan bahwa data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Serta mendapatkan nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 30; (3) Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) mempunyai nilai *mean* 30,40. Dengan *standard deviation* sebesar 3,401. Hal ini menunjukkan bahwa *standard deviation* lebih kecil daripada nilai rata-rata. Sehingga mengindikasikan bahwa data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Serta mendapatkan nilai minimum sebesar 21 dan nilai maksimum sebesar 35; (4) Variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempunyai nilai *mean* 45,56. Dengan *standard deviation* sebesar 4,768. Hal ini menunjukkan bahwa *standard deviation* lebih kecil daripada nilai rata-rata. Sehingga mengindikasikan bahwa data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Serta mendapatkan nilai minimum sebesar 35 dan nilai maksimum sebesar 55.

### Uji Validitas

Hasil uji validitas dari variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja dapat dikatakan valid, karena dari *degree of freedom* ( $df$ ) =  $N-2$  jadi  $68-2 = 66$  dengan taraf signifikan  $\alpha=5\%$ , maka  $r_{tabel}$  dalam penelitian ini adalah 0,2387. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yakni  $r_{hitung} > 0,2387$ .

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat diandalkan karena menghasilkan jawaban yang konsisten. Uji reliabilitas diukur menggunakan program SPSS apabila nilai dari *Cronbach Alpha*  $> 0,70$  maka item-item pernyataan yang membentuk variabel penelitian dapat dikatakan reliabel. Dari hasil uji reliabilitas memberikan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

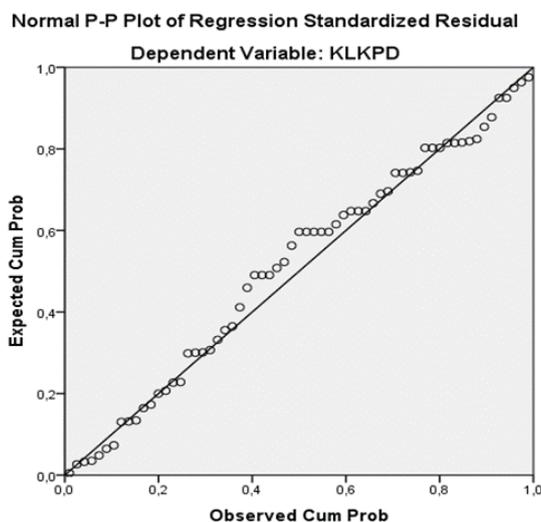
Variabel	<i>Cronbach's alpha</i> ( $\alpha$ )	Koefisien <i>alpha</i>	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,940	0,70	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,864	0,70	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,899	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,916	0,70	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa uji reliabilitas terhadap semua variabel menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70. Maka dapat dinyatakan reliabel atau pengukuran data dapat diandalkan. Dengan demikian syarat reliabilitas dalam penelitian ini sudah terpenuhi.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisa terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Uji normalitas ini dapat diukur dengan menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan uji normal *Probability Plot* dan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). hal ini dilakukan untuk menghindari bias yang dapat ditimbulkan apabila hanya menggunakan uji normal *Probability Plot* saja. Data diolah dengan menggunakan bantuan IBM SPSS STATISTICS 23 yang dilakukan dengan uji statistik dan pendekatan grafik. Pada pengujian awal, menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis diagonal seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2  
Normal Probability Plot  
Sumber: Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan grafik Normal *Probability Plot* pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. Pengujian normalitas selanjutnya adalah uji statistik yang dilakukan dengan uji *One-sampel Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 3, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3  
Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		68
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.000000
	Std. Deviation	2,65701203
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.061
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan alat bantu komputer yang menggunakan bantuan program IBM SPSS STATISTICS 23 *for windows* diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3. Pengujian dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu 0,76

menunjukkan data sudah terdistribusi normal karena dapat terlihat oleh nilai signifikan sebesar  $0,95 > 0,05$  karena data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2018:108). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan varian *inflation factor*. Apabila diperoleh hasil pengujian dari nilai TOL lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. Berikut ini merupakan merupakan hasil pengujian multikolinieritas:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

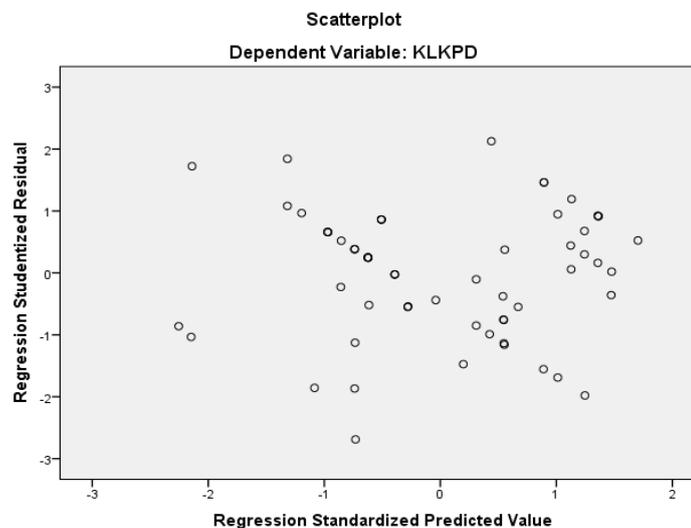
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KSDM	.844	1.185
PTI	.844	1.185

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Hasil Pengujian berdasarkan Tabel 4, bahwa nilai *tolerance* (TOL) pada setiap variabel independen memiliki nilai  $TOL > 0,10$  dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada setiap variabel memiliki nilai  $VIF < 10$ . Hal ini dapat menunjuka bahwa model regresi dari variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:138). Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *Scatter Plot* dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Adapun dasar untuk menganalisisnya adalah (1) Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, (2) Jika tidak ada serta titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini :



**Gambar 3**  
**Grafik Scatterplot**

Sumber: Sumber: Data Primer diolah, 2020

Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antar satu varians dari residual, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik dan telah terpenuhi asumsi-asumsi dalam model regresi linier berganda selanjutnya dilakukan pengujian regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, diolah dengan menggunakan SPSS versi 23.0 dengan menggunakan hasil perhitungan yang terjadi pada Tabel 5, berikut ini:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,061	3,543		,864	,391
KSDM	,341	,122	,264	2,796	,007
PTI	,750	,111	,619	6,741	,000
KSDM_SPI	,003	,003	,153	1,115	,270
PTI_SPI	,002	,002	,148	1,094	,015

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Pengujian regresi linier berganda dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan ditolak atau diterima berdasarkan dengan koefisien regresi. Berdasarkan hasil uji pada Tabel 5, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KLKPD = 3,061 + 0,341KSDM + 0,750PTI + 0,03KSDM*SPI + 0,002PTI*SPI + e$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan bahwa: (1) Nilai konstanta sebesar 3,061, menunjukkan bahwa apabila variabel dependen yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut. Besarnya nilai konstanta 3,061 menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sama dengan 0, maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sama dengan nilai 3,061; (2) Nilai koefisien KSDM sebesar 0,341, menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara KSDM dengan KLKPD. Apabila KSDM meningkat sebesar 0,341, maka KLKPD akan meningkat pula sebesar 0,341. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi KSDM, maka nilai KLKPD akan meningkat pula, begitupun sebaliknya. Jika semakin rendah kompetensi sumber daya manusia maka semakin rendah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (3) Nilai koefisien PTI sebesar 0,750, menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara PTI dengan KLKPD. Apabila PTI meningkat sebesar 0,750, maka KLKPD akan meningkat pula sebesar 0,750. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi PTI, maka nilai KLKPD akan meningkat pula, begitupun sebaliknya. Jika semakin rendah pemanfaatan teknologi informasi maka semakin rendah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (3) Nilai koefisien KSDM\*SPI sebesar 0,003, memperlihatkan arah hubungan positif (searah) antara KSDM\*SPI dengan KLKPD. Apabila KSDM\*SPI mengalami peningkatan sebesar 0,003, maka KLKPD akan meningkat sebesar 0,003. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi SPI memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat, begitupun sebaliknya; (4) Nilai koefisien PTI\*SPI sebesar 0,002, memperlihatkan arah hubungan positif (searah) antara PTI\*SPI dengan KLKPD. Apabila nilai SPI yang memoderasi PTI mengalami peningkatan sebesar 0,002, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD) akan meningkat sebesar

0,002. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi PTI\*SPI, maka KLKPD akan meningkat, begitupun sebaliknya.

### Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji parsial atau uji t ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen: (1) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_1$  akan ditolak; (2) Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  akan diterima

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,061	3,543		,864	,391
KSDM	,362	,117	,280	3,092	,003
PTI	,737	,110	,608	6,709	,000
KSDM_SPI	,003	,003	,153	1,115	,270
PTI_SPI	,002	,002	,148	1,094	,015

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pada Tabel 6 didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

(1) Menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya (KSDM) mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD). Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pengaruh KSDM terhadap KLKPD menghasilkan nilai t hitung positif sebesar 3,092 dengan signifikansi  $0,003 < 0,05$  ( $\alpha=5\%$ ). Sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima, karena pengaruh KSDM terhadap KLKPD terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama yang diajukan mendukung penelitian ini; (2) Menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (PTI) mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD). Hasil penelitian ini membuktikan, pengaruh PTI terhadap KLKPD menghasilkan nilai t hitung positif sebesar 6,709 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  ( $\alpha=5\%$ ). Sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima, karena pengaruh PTI terhadap KLKPD terbukti berpengaruh positif dan signifikan; (3) Menunjukkan bahwa pengaruh KSDM\*SPI terhadap KLKPD menghasilkan nilai t hitung positif sebesar 1,115 dengan nilai signifikansi  $0,270 > 0,05$  ( $\alpha=5\%$ ). Sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak, karena terbukti peran SPI tidak mampu memoderasi positif hubungan pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga yang diajukan tidak mendukung penelitian ini; (4) Menunjukkan pengaruh PTI\*SPI terhadap KLKPD menghasilkan nilai t hitung positif sebesar 1,094 dengan nilai signifikansi  $0,015 < 0,05$  ( $\alpha=5\%$ ). Sehingga hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima, karena terbukti peran SPI dapat memoderasi positif pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keempat yang diajukan mendukung penelitian ini.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai mendekati satu maka semakin baik hasil untuk model regresi dan variabel-variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel dependen. Berikut dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 7 dibawah ini:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,789 <sup>a</sup>	,623	,597	2,61475

a. Predictors: (Constant), PTI\_SPI, KSDM, PTI, KSDM\_SPI

b. Dependent Variable: KLKPD

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Dari hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 7, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi untuk model yang menunjukkan nilai *R Square* regresi dalam penelitian ini sebesar 0,623 atau 62,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan sisanya (100% - 62,3% = 37,7%) dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Berikut dapat dilihat hasil uji kelayakan model (Uji F) pada perhitungan statistik dibawah ini:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Kelayakan Model (F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	623,727	4	155,932	21,153	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	427,543	58	7,371		
Total	1051,270	62			

a. Dependent Variable: KLKPD

b. Predictors: (Constant), PTI\_SPI, PTI, KSDM, KSDM\_SPI

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pada Tabel 8 menunjukkan bahwa dalam hasil regresi moderasi diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat  $\alpha = 0,05$ . Karena nilai KLKPD signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi ini dapat digunakan sebagai pemrediksi nilai KLKPD atau dapat dikatakan PTI\*SPI, PTI, KSDM, KSDM\*SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut layak untuk digunakan sebagai penelitian.

### Pembahasan

#### Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa t hitung sebesar 3,092 dengan nilai signifikansi  $0,003 < 0,05$  sehingga  $H_1$  dapat diterima. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa responden yang bekerja di OPD Kabupaten Sidoarjo pada umumnya menyadari bahwa kompetensi sumber daya manusia menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki kemampuan dibidangnya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas. Hasil penelitian ini didukung oleh landasan teori yang mengatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara

masyarakat (*principal*) dengan pemerintah (*agent*) yang berkewajiban untuk melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016), Hanalir *et al.* (2018) dan Ramadhani *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan fakta yang ada di Kabupaten Sidoarjo bahwa pemerintah telah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai yang terlihat dari banyaknya responden yang setuju pada indikator pengetahuan dan sikap.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa  $t$  hitung sebesar 6,709 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_2$  dapat diterima. Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dipengaruhi oleh jawaban responden melalui kuesioner, yang mana dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang didukung dengan pengolahan data transaksi menggunakan *software* yang sesuai, dapat mempercepat penyajian laporan keuangan dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan atau memposting dokumen baru, jurnal serta buku besar, sehingga akan menjadikan suatu laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hardyansyah (2016), Ramadhani *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa OPD Kabupaten Sidoarjo telah didukung teknologi baik *software* dan *hardware* dalam hal menjalankan kegiatan organisasinya.

### **Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa  $t$  hitung sebesar 1,115 dengan nilai signifikansi  $0,270 > 0,05$  sehingga  $H_3$  ditolak. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern terbukti dapat memoderasi positif pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, responden sepakat bahwa pemerintah masih kurang dalam penempatan KSDM sesuai bidangnya. Walaupun OPD Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak pegawai akan tetapi kurangnya evaluasi terhadap posisi pegawai dan kurangnya pegawai dalam meng-*upgrade* pengetahuan dibidang akuntansi/keuangan, baik membaca *literature* berupa jurnal-jurnal akuntansi maupun buku-buku terkait dengan akuntansi. Meskipun di OPD Kabupaten Sidoarjo banyak melakukan pelatihan, akan tetapi pegawai tersebut sukar untuk memahami materi pelatihan tersebut dikarenakan tidak adanya dasar ilmu dari pendidikan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan akuntansi/keuangan. Penelitian ini mendukung teori keagenan (*agency theory*). Karena teori ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh dirinya sendiri sehingga peran pemimpin sangatlah berperan dalam menjalankan tujuan suatu organisasi. Ketika pimpinan suatu organisasi bukan seseorang yang berkompeten dalam menjalankan SPI maka kurang mampu dalam mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya manusia.

Penelitian ini sejalan dengan Fikri *et al.* (2015), Hardyansyah (2016) dan Adhitama *et al.* (2019) menunjukkan sistem pengendalian intern tidak memoderasi kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pengelola keuangan yang bukan berlatar belakang akuntansi/keuangan.

### **Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa  $t$  hitung positif sebesar 1,094 dengan nilai signifikansi  $0,015 < 0,05$  sehingga  $H_4$  diterima. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern terbukti dapat memoderasi positif pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mempunyai sistem pengendalian intern yang baik dan memadai sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem pengendalian intern berupa pengendalian atas aplikasi yang digunakan di OPD Kabupaten Sidoarjo untuk menunjang kegiatan operasional suatu entitas. Pengendalian aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada adanya kerusakan pada perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Pengendalian aplikasi ini juga dilakukan untuk perubahan maupun pengembangan dari perangkat lunak serta pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016) bahwa pengendalian intern bertujuan agar suatu entitas atau organisasi tetap memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan, dikarenakan pengendalian intern sudah terintegrasi dengan teknologi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menjelaskan jika kompetensi sumber daya manusia meningkat maka akan meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (2) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menjelaskan jika pemanfaatan teknologi informasi meningkat maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (3) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemerintah masih kurang dalam penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait dengan penatausahaan laporan dibidang akuntansi/keuangan dan meningkatkan kompetensi pegawai. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian intern dalam mengelola sumber daya manusia agar ditempatkan sesuai bidangnya; (4) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern mampu memoderasi positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini diindikasikan oleh sistem pengendalian intern melalui aplikasi yang sesuai, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa keterbatasan yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Beberapa item pertanyaan didalam kuesioner penelitian ini, menjelaskan konsep-konsep yang digunakan secara umum dan kurang spesifik untuk

organisasi pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi kualitas kuesioner yang digunakan peneliti sebagai media dalam pengumpulan data; (2) Terbatasnya variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan masih banyak variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (3) Penelitian ini hanya dilakukan pada 20 OPD Kabupaten Sidoarjo, sehingga hasil penelitian belum dapat di generalisir ke semua objek.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Bagi penelitian selanjutnya dalam pengumpulan data perlu memperhatikan kualitas dan spesifikasi kuesioner yang relevan sehingga dapat mencerminkan keadaan objek penelitian saat ini; (2) Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Misalnya pemahaman standar akuntansi pemerintah, komitmen organisasi dan peran audit internal; (3) Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi penelitian, sehingga diharapkan mampu memberikan hasil penelitian bersifat umum dan dapat di generalisir ke semua objek.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, P. P., Suratno, dan E. Supriyadi. 2019. Analisis Determinan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekobisman* (3): 2597-9302.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2019. [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). 20 Oktober 2019.
- Fikri, M. A., B. A. Inapty, dan RR. S. P. Martiningsih. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Mataram* 7(4): 45-76.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hanalir, N. Dali, dan Husin. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna). *E- International Standard Serial Number*. Universitas Halu Oleo. Sulawesi Tenggara (9)3: 110-145.
- Hardyansyah. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 1(1): 15-18.
- Indriasari, D. dan E. Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah: Studi pada Pemerintahan Kota Palembang dan Kabupaten Organ Ilir. *Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak*. 20-23 September: 1-20.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Finance and Economic* 13: 305-360.
- Kurniawati, I., Rispantyo, dan D. Kristianto. 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap

- Keterandalan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 14(1): 76-88.
- Nurillah, S. A. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Oktavia, S. dan S. Rahayu. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *International Standard Serial Number e-Proceeding of Management* 6(1): 652.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil*. 10 November 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 56 Tahun 2005 *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 60 tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5. Jakarta.
- Ramadhani, M., A.N. Soerono., dan W. Mulyasari. 2018. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi* 12(1): 40-63.
- Ramadhan A. 2020. Kasus Bupati Sidoarjo. *kompas.com*. 9 Januari 2020. (10:00).
- Sudiarianti, N. M., U. I. G. K. Agung., dan Budiasih. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII* Medan. 16-19 September: 1-25.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Widari, L. dan Sutrisno. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* 7(1): 47-70.